



PERAN GURU DALAM MENANAMKAN NILAI HAK ASASI MANUSIA PADA ANAK DI SEKOLAH DASAR

Aisah¹⁾, Arya Praja Hadinata²⁾, Dicka Zulkarnain³⁾, Niken Dwi Artika⁴⁾,
Winda Wanajemi⁵⁾, Kayla Meylani Putri⁶⁾

^{1),2),3) 4),5),6)}STKIP Al Maksum Langkat, Stabat, Indonesia

¹⁾ajahaisah@gmail.com, ²⁾aryapraja542@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai hak asasi manusia (HAM) pada siswa sekolah dasar melalui pendekatan tinjauan literatur. Metode yang digunakan adalah literature review dengan mengkaji 15 artikel ilmiah relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi tematik, evaluasi kualitas sumber, dan sintesis data. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai teladan, fasilitator, dan pengelola lingkungan belajar dalam menanamkan nilai-nilai HAM seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Namun, efektivitas peran tersebut dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik guru, integrasi kurikulum, serta interaksi dengan lingkungan keluarga dan sosial siswa. Temuan juga menunjukkan bahwa penanaman nilai HAM yang efektif harus berbasis praktik nyata, pembiasaan, dan kolaborasi lintas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ekosistem pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci: Guru, HAM, dan Anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of teachers in instilling human rights values in elementary school students through a literature review approach. The method used was a literature review, which examined 15 relevant scientific articles. The analysis was conducted through the stages of classification, thematic classification, source quality evaluation, and data synthesis. The results of the study indicate that teachers have a strategic role as role models, facilitators, and managers of the learning environment in instilling human rights values such as tolerance, justice, and respect for diversity. However, the effectiveness of this role is influenced by teachers' pedagogical competence, curriculum integration, and interactions with students' families and social environments. The findings also indicate that effective instilling human rights values must be based on real-world practice, habituation, and cross-environment collaboration. Therefore, an educational ecosystem approach involving schools, families, and the community is necessary.



Keywords: *Teachers, Human Rights, and Children.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses strategis dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku peserta didik agar mampu berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pada jenjang sekolah dasar, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan nilai dan karakter, termasuk nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) seperti keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, saling menghormati, gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air berdampak nyata pada pembentukan karakter siswa. Siswa yang mendapatkan pembelajaran Pancasila secara efektif menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengelola emosi, bekerja sama, menyelesaikan konflik secara damai, serta berkurangnya perilaku perundungan (Armianti, 2025)

Penanaman nilai HAM sejak usia dini menjadi penting karena pada tahap ini anak berada dalam fase perkembangan moral dan sosial yang menentukan pola sikapnya di masa depan. Pendidikan HAM tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman konseptual mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga membentuk kesadaran dan perilaku yang menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari (Lile, 2020). Namun demikian, implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan. Proses pembelajaran cenderung berfokus pada aspek kognitif dan belum sepenuhnya mengarah pada internalisasi nilai dalam bentuk sikap dan perilaku nyata. Akibatnya, nilai-nilai HAM sering kali hanya dipahami secara teoritis tanpa diikuti dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari siswa (Hidayat, 2022). Hal ini tercermin dari masih ditemukannya perilaku perundungan, diskriminasi, serta rendahnya sikap toleransi di lingkungan sekolah.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara konsep ideal pendidikan HAM dengan praktik di lapangan. Secara teoritis, pendidikan HAM menekankan pembelajaran yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman. Namun, dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan masih bersifat konvensional dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengalami secara langsung nilai-nilai tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai HAM belum berjalan secara optimal. Dalam konteks tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai aktor utama dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan, fasilitator, dan pengelola lingkungan belajar yang dapat membentuk karakter siswa. Kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam pembelajaran menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan HAM di sekolah dasar (Hasanah et al., 2024).

Meskipun demikian, peran guru tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga, kondisi sosial budaya, serta perkembangan media digital yang turut memengaruhi pembentukan sikap dan perilaku siswa (Utami, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penanaman nilai HAM merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran di kelas.



Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai hak asasi manusia pada siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru dalam penanaman nilai HAM melalui pendekatan tinjauan literatur.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai artikel ilmiah yang berasal dari jurnal nasional terindeks dan buku akademik yang relevan. Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Guru dalam Penanaman Nilai HAM

Hasil kajian menunjukkan bahwa guru memiliki peran sebagai teladan dalam proses penanaman nilai kepada peserta didik. Sebagai teladan, guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memperlihatkan secara langsung perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Sikap adil yang ditunjukkan guru, misalnya dalam memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh siswa tanpa diskriminasi, menjadi contoh konkret bagi siswa dalam memahami makna keadilan. Selain itu, guru yang menghargai perbedaan latar belakang, kemampuan, maupun pendapat siswa akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan toleran.

Lebih lanjut, perilaku demokratis guru, seperti memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, berdiskusi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan di kelas, juga berperan penting dalam membentuk karakter siswa. Melalui keteladanan ini, siswa tidak hanya memahami nilai secara kognitif, tetapi juga menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran guru sebagai teladan menjadi strategi yang efektif dalam internalisasi nilai karena siswa belajar melalui observasi dan pengalaman langsung, bukan sekadar penjelasan teoritis (Wibowo, 2021).

Secara empiris dari hasil sintesis literatur, peran sebagai teladan muncul sebagai faktor yang paling konsisten memengaruhi internalisasi nilai. Guru yang menunjukkan sikap adil, menghargai perbedaan, dan bersikap demokratis cenderung menghasilkan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa proses internalisasi nilai HAM lebih efektif terjadi melalui observasi langsung dibandingkan penyampaian materi secara verbal.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara peran ideal dan praktik di lapangan. Dalam beberapa studi, guru masih berperan dominan sebagai penyampai materi, sehingga dimensi afektif dan perilaku siswa kurang berkembang. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pendekatan normatif pendidikan HAM dan implementasi aktual di kelas (Hidayat, 2022).

B. Strategi Penanaman Nilai HAM

Beberapa strategi pembelajaran berbasis nilai yang efektif dalam pendidikan dasar meliputi diskusi kelompok, kegiatan pemecahan masalah (*problem solving*), serta pembiasaan perilaku positif di dalam kelas. Diskusi kelompok dan *problem solving* memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran,



sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memahami nilai melalui interaksi sosial yang bermakna. Hal ini sejalan dengan temuan Johnson & Johnson (2020) yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan pemahaman nilai melalui kerja sama dan interaksi antar siswa.

Selain itu, hasil kajian mengindikasikan bahwa pembiasaan merupakan faktor kunci dalam memperkuat internalisasi nilai. Siswa yang terlibat dalam praktik berulang seperti kerja sama, saling menghargai, dan penyelesaian konflik secara damai menunjukkan kecenderungan perilaku yang lebih konsisten dalam menerapkan nilai HAM. Akan tetapi, tanpa disertai refleksi, pembiasaan berisiko hanya menghasilkan kepatuhan tanpa pemahaman (Lickona, 2021).

C. Tantangan dalam Implementasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber, strategi yang paling efektif dalam penanaman nilai HAM adalah strategi yang berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*). Pola yang muncul menunjukkan bahwa metode seperti diskusi kelompok, problem solving, dan pembelajaran kooperatif berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman nilai sekaligus keterampilan sosial siswa.

Namun, temuan kajian juga memperlihatkan bahwa efektivitas strategi tersebut sangat bergantung pada kualitas fasilitasi guru. Dalam beberapa kasus, diskusi kelompok tidak berjalan optimal karena kurangnya pengelolaan interaksi, sehingga justru menimbulkan dominasi atau eksklusi antar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa metode tidak secara otomatis menghasilkan internalisasi nilai, melainkan membutuhkan kompetensi pedagogik yang memadai.

Selain itu, hasil kajian mengindikasikan bahwa pembiasaan merupakan faktor kunci dalam memperkuat internalisasi nilai. Siswa yang terlibat dalam praktik berulang seperti kerja sama, saling menghargai, dan penyelesaian konflik secara damai menunjukkan kecenderungan perilaku yang lebih konsisten dalam menerapkan nilai HAM. Akan tetapi, tanpa disertai refleksi, pembiasaan berisiko hanya menghasilkan kepatuhan tanpa pemahaman (Lickona, 2021).

Dalam implementasi penanaman nilai di sekolah dasar, terdapat beberapa tantangan utama. Pertama, perbedaan latar belakang siswa menjadi salah satu kendala yang signifikan. Siswa memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam, sehingga memengaruhi cara mereka memahami serta menginternalisasi nilai yang diajarkan di sekolah. Kedua, pengaruh lingkungan keluarga dan media sosial juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tidak selalu sejalan dengan pola asuh di rumah maupun informasi yang diperoleh siswa dari media sosial. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian nilai yang berdampak pada perilaku siswa sehari-hari (Lestari, 2023).

D. Integrasi Nilai HAM dalam Kurikulum dan Praktik Pembelajaran

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai HAM dalam kurikulum masih bersifat parsial dan belum terstruktur secara sistematis. Sebagian besar implementasi masih terbatas pada mata pelajaran tertentu, terutama Pendidikan Kewarganegaraan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa siswa belum memperoleh pengalaman belajar yang holistik terkait nilai HAM. Padahal, literatur menunjukkan bahwa integrasi lintas mata pelajaran dapat memperkuat relevansi nilai dengan kehidupan



nyata siswa. Ketidakterpaduan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya transfer nilai dari konteks pembelajaran ke praktik sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penanaman nilai HAM tidak hanya ditentukan oleh metode pembelajaran, tetapi juga oleh sejauh mana nilai tersebut diintegrasikan secara konsisten dalam seluruh aktivitas pendidikan.

Selain peran guru sebagai teladan dan fasilitator, aspek penting yang sering kurang optimal adalah integrasi nilai HAM dalam kurikulum secara sistematis. Dalam praktiknya, nilai HAM sering hanya muncul secara implisit dalam mata pelajaran seperti PPKn, tanpa dirancang sebagai capaian pembelajaran yang terukur. Hal ini menyebabkan internalisasi nilai menjadi tidak konsisten dan bergantung pada inisiatif individu guru.

Secara ideal, nilai HAM perlu diintegrasikan dalam:

- Tujuan pembelajaran
- Materi ajar
- Metode pembelajaran
- Evaluasi sikap dan perilaku siswa

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa banyak guru masih berfokus pada penyampaian materi kognitif dibandingkan pembentukan sikap (Hidayat, 2022). Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kurikulum formal dan kurikulum implementatif di kelas.

E. Tantangan Implementasi Berdasarkan Sintesis Temuan

Hasil kajian mengidentifikasi beberapa pola tantangan utama yang muncul secara berulang dalam berbagai penelitian. Pertama, keberagaman latar belakang siswa menjadi faktor yang memengaruhi perbedaan tingkat pemahaman dan penerimaan nilai. Namun, temuan ini juga menunjukkan bahwa keberagaman bukan semata hambatan, melainkan dapat menjadi sumber pembelajaran jika dikelola dengan tepat.

Kedua, terdapat pengaruh signifikan dari lingkungan keluarga dan media sosial terhadap pembentukan sikap siswa. Dalam beberapa studi, nilai yang diajarkan di sekolah tidak selalu selaras dengan nilai yang diterapkan di rumah, sehingga menimbulkan konflik nilai pada siswa. Hal ini memperlihatkan bahwa sekolah bukan satu-satunya agen dalam pendidikan HAM.

Ketiga, keterbatasan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai HAM juga menjadi temuan penting. Beberapa studi menunjukkan bahwa guru belum memiliki pemahaman yang memadai terkait strategi pembelajaran berbasis nilai, sehingga proses pembelajaran masih cenderung berorientasi kognitif (Hasanah et al., 2024).

F. Implikasi: Kebutuhan Pendekatan Ekosistem Pendidikan

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, terlihat bahwa penanaman nilai HAM tidak dapat dilakukan secara parsial. Terdapat pola yang menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi nilai sangat dipengaruhi oleh konsistensi lingkungan yang diterima siswa.

Hal ini mengarah pada kebutuhan pendekatan berbasis ekosistem pendidikan, di mana sekolah, keluarga, dan masyarakat berperan secara sinergis. Tanpa adanya keselarasan antar lingkungan, nilai yang dipelajari siswa cenderung tidak terinternalisasi secara optimal.



Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa peran guru memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Guru berfungsi sebagai penggerak utama di sekolah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan sistem pendidikan yang lebih luas (Utami, 2024).

G. Dimensi Psikologis dalam Internalisasi Nilai HAM pada Anak

Selain aspek pedagogis, penanaman nilai HAM juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan psikologis anak. Pada usia sekolah dasar, anak berada pada tahap perkembangan moral konkret, di mana mereka memahami nilai berdasarkan pengalaman langsung dan contoh nyata di lingkungan sekitar (Lile, 2020).

Hal ini berarti bahwa keberhasilan guru dalam menanamkan nilai HAM tidak hanya bergantung pada metode pembelajaran, tetapi juga pada kesesuaian pendekatan dengan tahap perkembangan kognitif dan emosional siswa. Misalnya, anak lebih mudah memahami konsep keadilan melalui situasi konkret seperti pembagian tugas yang adil, dibandingkan melalui definisi abstrak (Lickona, 2021).

Selain itu, teori belajar sosial menunjukkan bahwa anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari figur otoritas, termasuk guru. Oleh karena itu, konsistensi sikap guru menjadi faktor krusial. Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan guru dapat menimbulkan kebingungan nilai pada siswa dan menghambat proses internalisasi (Wibowo, 2021).

H. Peran Lingkungan Sekolah sebagai Kultur Nilai (*Hidden Curriculum*)

Penanaman nilai HAM tidak hanya terjadi melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi. Ini mencakup norma, kebiasaan, dan budaya sekolah yang secara tidak langsung membentuk karakter siswa (Hidayat, 2022).

Misalnya cara guru menangani konflik antar siswa, sistem penghargaan dan hukuman, serta interaksi antar warga sekolah menjadi bagian penting dalam pembentukan nilai siswa.

Jika lingkungan sekolah menjunjung tinggi nilai keadilan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan, maka siswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai HAM secara alami. Sebaliknya, jika terdapat praktik diskriminatif atau otoriter di sekolah, maka hal tersebut dapat melemahkan pendidikan HAM, meskipun secara formal diajarkan di kelas (Hidayat, 2022).

I. Integrasi Teknologi dalam Pendidikan HAM

Di era digital, teknologi memiliki peran ganda dalam penanaman nilai HAM. Di satu sisi, media digital dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif, seperti video edukatif tentang toleransi dan keberagaman, simulasi konflik sosial, serta platform diskusi daring (Utami, 2024).

Namun di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan seperti paparan ujaran kebencian, *cyberbullying*, serta informasi yang tidak sesuai dengan nilai HAM. Oleh karena itu, guru perlu memiliki literasi digital yang memadai agar dapat membimbing siswa dalam menggunakan teknologi secara bijak (Utami, 2024).

Pendidikan HAM di era modern tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional, tetapi harus adaptif terhadap perkembangan digital agar tetap relevan dengan kehidupan siswa.



J. Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan Pendidikan HAM

Salah satu kelemahan utama dalam implementasi pendidikan HAM adalah kurangnya sistem evaluasi yang komprehensif. Selama ini, penilaian cenderung berfokus pada aspek kognitif, seperti pemahaman konsep HAM (Hidayat, 2022).

Padahal, keberhasilan pendidikan HAM seharusnya diukur melalui sikap (afektif) seperti toleransi, empati, dan rasa keadilan, serta perilaku (psikomotorik) berupa tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konsistensi nilai juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan internalisasi nilai.

Pendekatan penilaian autentik seperti observasi, jurnal refleksi, dan penilaian teman sebaya dapat menjadi alternatif untuk mengukur internalisasi nilai secara lebih akurat (Lickona, 2021).

K. Peran Kolaborasi Multistakeholder

Penanaman nilai HAM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya guru. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan nilai (Lestari, 2023).

Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk komunikasi rutin antara sekolah dan orang tua, kegiatan sosial berbasis nilai kemanusiaan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan HAM merupakan tanggung jawab kolektif. Tanpa dukungan lingkungan yang konsisten, nilai yang diajarkan di sekolah berpotensi tidak terinternalisasi secara optimal dalam diri siswa (Utami, 2024).

L. Analisis Kritis: Kesenjangan antara Idealitas dan Realitas

Jika ditinjau secara kritis, terdapat kesenjangan antara konsep ideal pendidikan HAM dengan praktik di lapangan. Secara teoritis, pendidikan HAM bersifat partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman (Hasanah et al., 2024).

Namun dalam praktiknya masih ditemukan dominasi metode ceramah, minimnya refleksi siswa, serta kurangnya integrasi lintas mata pelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada implementasi, bukan pada konsep pendidikan HAM itu sendiri (Hidayat, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan guru berbasis praktik, penguatan kurikulum implementatif, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar pendidikan HAM dapat berjalan secara efektif (Hasanah et al., 2024).

M. Dampak Penanaman Nilai HAM pada Siswa

Penanaman nilai HAM yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak positif, antara lain:

- Siswa menjadi lebih peduli dan menghargai orang lain
- Meningkatkan sikap toleransi dan empati
- Membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab
- Menyiapkan siswa menjadi warga negara yang baik

Dengan demikian, pendidikan HAM tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat secara luas (Wibowo, 2025).



IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penanaman nilai hak asasi manusia (HAM) pada siswa sekolah dasar. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai penyampai materi, tetapi mencakup fungsi yang lebih komprehensif sebagai teladan, fasilitator, serta pengelola lingkungan belajar yang kondusif bagi internalisasi nilai. Melalui keteladanan, guru berkontribusi secara langsung dalam membentuk perilaku siswa, sedangkan melalui peran fasilitator, guru mampu menciptakan pengalaman belajar yang partisipatif dan bermakna.

Namun demikian, efektivitas peran guru dalam menanamkan nilai HAM tidak bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional. Faktor internal seperti kompetensi pedagogik, kemampuan reflektif, serta pemahaman guru terhadap pendidikan berbasis nilai menjadi determinan utama dalam keberhasilan proses pembelajaran. Di sisi lain, faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, kondisi sosial budaya, serta perkembangan teknologi digital turut memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku siswa.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penanaman nilai HAM yang efektif tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kognitif semata, melainkan harus diintegrasikan melalui pengalaman nyata, pembiasaan, serta interaksi sosial yang berkelanjutan. Proses internalisasi nilai akan lebih optimal apabila siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), pembelajaran kooperatif, serta praktik reflektif menjadi strategi yang relevan untuk memperkuat dimensi afektif dan perilaku siswa.

Selain itu, integrasi nilai HAM dalam kurikulum masih menunjukkan kecenderungan yang parsial dan belum terstruktur secara sistematis. Hal ini berdampak pada rendahnya konsistensi dalam proses internalisasi nilai di berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kurikulum yang tidak hanya menempatkan nilai HAM sebagai muatan implisit, tetapi sebagai bagian integral dalam tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran.

Lebih lanjut, terdapat kesenjangan antara konsep ideal pendidikan HAM yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman dengan praktik implementasi di lapangan yang masih cenderung konvensional dan berorientasi pada aspek kognitif. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pendidikan HAM bukan terletak pada kerangka konseptual, melainkan pada aspek implementasi dan kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru.

Dengan demikian, penanaman nilai HAM pada siswa sekolah dasar perlu dipahami sebagai proses yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh peran guru di dalam kelas, tetapi juga oleh sinergi antara berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif berbasis ekosistem pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan guna memastikan konsistensi nilai yang diterima siswa di berbagai lingkungan.

Sebagai implikasi, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis praktik, penguatan literasi digital, serta



pengembangan model pembelajaran yang berorientasi pada internalisasi nilai. Selain itu, perlu adanya sistem evaluasi yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan perilaku siswa. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan pendidikan HAM dapat berkontribusi secara optimal dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penanaman nilai hak asasi manusia (HAM) pada siswa sekolah dasar. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai penyampai materi, tetapi mencakup fungsi yang lebih komprehensif sebagai teladan, fasilitator, serta pengelola lingkungan belajar yang kondusif bagi internalisasi nilai. Melalui keteladanan, guru berkontribusi secara langsung dalam membentuk perilaku siswa, sedangkan melalui peran fasilitator, guru mampu menciptakan pengalaman belajar yang partisipatif dan bermakna.

Namun demikian, efektivitas peran guru dalam menanamkan nilai HAM tidak bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional. Faktor internal seperti kompetensi pedagogik, kemampuan reflektif, serta pemahaman guru terhadap pendidikan berbasis nilai menjadi determinan utama dalam keberhasilan proses pembelajaran. Di sisi lain, faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, kondisi sosial budaya, serta perkembangan teknologi digital turut memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku siswa.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penanaman nilai HAM yang efektif tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kognitif semata, melainkan harus diintegrasikan melalui pengalaman nyata, pembiasaan, serta interaksi sosial yang berkelanjutan. Proses internalisasi nilai akan lebih optimal apabila siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), pembelajaran kooperatif, serta praktik reflektif menjadi strategi yang relevan untuk memperkuat dimensi afektif dan perilaku siswa.

Selain itu, integrasi nilai HAM dalam kurikulum masih menunjukkan kecenderungan yang parsial dan belum terstruktur secara sistematis. Hal ini berdampak pada rendahnya konsistensi dalam proses internalisasi nilai di berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kurikulum yang tidak hanya menempatkan nilai HAM sebagai muatan implisit, tetapi sebagai bagian integral dalam tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran.

Lebih lanjut, terdapat kesenjangan antara konsep ideal pendidikan HAM yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman dengan praktik implementasi di lapangan yang masih cenderung konvensional dan berorientasi pada aspek kognitif. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pendidikan HAM bukan terletak pada kerangka konseptual, melainkan pada aspek implementasi dan kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru.

Dengan demikian, penanaman nilai HAM pada siswa sekolah dasar perlu dipahami sebagai proses yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh peran guru di dalam kelas, tetapi juga oleh sinergi



antara berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif berbasis ekosistem pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan guna memastikan konsistensi nilai yang diterima siswa di berbagai lingkungan.

Sebagai implikasi, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis praktik, penguatan literasi digital, serta pengembangan model pembelajaran yang berorientasi pada internalisasi nilai. Selain itu, perlu adanya sistem evaluasi yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan perilaku siswa. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan pendidikan HAM dapat berkontribusi secara optimal dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armianti, R. (2025). Peran guru kelas dalam membentuk karakter siswa melalui pembelajaran pendidikan Pancasila.
- Hasanah, S. U., Febrianti, A., & Firmansyah, S. (2024). Peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM pada pembelajaran. **Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan**.
- Hidayat, R. (2022). Implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar. **Jurnal Pendidikan Sosial*, 8*(2), 67–78.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2020). Cooperative learning in 21st century education. **Journal of Educational Psychology*, 112*(5), 857–872. <https://doi.org/10.1037/edu0000405>
- Lestari, P. (2023). Peran lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter anak. **Jurnal Psikologi Pendidikan*, 10*(1), 34–46.
- Lickona, T. (2021). Character education and moral development in schools. **Journal of Moral Education*, 50*(3), 245–259.
- Lile, N. (2020). Human rights education: Definitions and approaches. **Oxford Review of Education**.
- Susanto, H. (2024). Strategi pembelajaran berbasis nilai dalam pendidikan dasar. **Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9*(1), 23–34.
- Utami, S. (2024). Pengaruh media sosial terhadap perilaku siswa sekolah dasar. **Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11*(2), 55–66.
- Wibowo, A. (2021). **Pendidikan karakter berbasis nilai kemanusiaan di sekolah dasar**. Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. (2025). Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia siswa sekolah dasar melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.